Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (554-564)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

INTEGRASI ANTARA POTENSI ALAM, POTENSI KEWIRAUSAHAAN, DAN TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN
(Studi pada Destinasi Wisata di Kabupaten Magetan, Jawa Timur)

Rita Haryati[1], Widyawati[2], Kristyan Dwijosusilo[3]
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Dr Soetomo Surabaya, Indonesia[1,2,3]
E-mail: ritaharyati339@gmail.com[1]

ABSTRACT

Magetan is rich in natural potential, yet its tourism heavily relies on a single destination: Lake Sarangan. As a result, surrounding tourism villages grow slowly, and economic benefits accumulate at a single point. This study seeks to integrate three elements that have hitherto operated independently natural potential, community entrepreneurship, and multi-stakeholder governance so that Magetan's tourism can develop more equitably and sustainably. Employing a qualitative approach with a case study design, the research population comprised tourism stakeholders in Magetan. A sample of twelve informants was selected using purposive sampling, representing the government, community, business actors, academia, and the media. Data were gathered through in-depth interviews, field observations, a focus group discussion, and document reviews, then analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (data condensation, data display, and drawing conclusions), with validity verified through triangulation. The findings reveal a clear pattern: while natural potential is diverse, tourist visits remain concentrated at the main landmark. Local community enterprises are active, but their added value and market access remain weak. Collaboration exists on paper, but it is largely confined to meetings rather than equitable, joint action. Economic benefits are unevenly distributed, and environmental carrying capacity is not yet applied as an operational limit. Based on these findings, the PAKTA Model was formulated, encompassing: Potential and carrying capacity mapping, Acceleration of entrepreneurship, Knowledge-driven and mandated pentahelix collaboration, Distribution of benefits governance, as well as Adaptation and accountability. The study concludes that Magetan does not lack potential; rather, it lacks orchestration to connect these three elements through a joint platform equipped with data, a mandate, and an orientation toward equitable growth.

Keywords: *Sustainable Tourism, Collaborative Governance, Local Entrepreneurship, Natural Potential, Pentahelix*

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (554-564)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

ABSTRAK

Magetan kaya potensi alam, tetapi wisatanya bertumpu pada satu nama, yaitu Telaga Sarangan. Akibatnya desa-desa wisata di sekitarnya tumbuh lambat dan manfaat ekonominya menumpuk di satu titik. Penelitian ini mencari cara memadukan tiga hal yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, yakni potensi alam, kewirausahaan warga, dan tata kelola yang melibatkan banyak pihak, supaya wisata Magetan berkembang lebih merata dan berkelanjutan. Penelitian bersifat kualitatif dengan rancangan studi kasus. Populasinya adalah pemangku kepentingan pariwisata Magetan, sedangkan sampelnya dipilih secara purposif sebanyak dua belas informan yang mewakili pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media. Data dihimpun lewat wawancara mendalam, observasi lapangan, satu diskusi kelompok, dan telaah dokumen, lalu diolah dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yaitu menyaring data, menyajikannya, dan menarik simpulan. Keabsahannya diperiksa melalui triangulasi. Temuannya cukup jelas. Potensi alam beragam, tetapi kunjungan menumpuk di ikon utama. Usaha warga hidup, namun nilai tambah dan akses pasarnya lemah. Kolaborasi sudah ada di atas kertas, tetapi masih sebatas rapat, bukan kerja bersama yang setara. Manfaat belum merata, dan daya dukung lingkungan belum dijadikan batas. Dari temuan itu disusun Model PAKTA, yakni Pemetaan potensi dan daya dukung, Akselerasi kewirausahaan, Kolaborasi pentahelix bermandat, Tata distribusi manfaat, serta Adaptasi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Magetan tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah orkestrasi yang menautkan ketiganya lewat forum bersama yang punya data, mandat, dan orientasi pemerataan.

Kata kunci: *Pariwisata Berkelanjutan, Tata Kelola Kolaboratif, Kewirausahaan Lokal, Potensi Alam, Penta Helix*

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu tumpuan ekonomi Indonesia. Sebelum pandemi, sektor ini menyumbang sekitar 5,0% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada 2019, lalu jatuh ke 2,2% pada 2020 ketika mobilitas dibatasi (Kementerian Keuangan, 2023). Saat pulih, pemerintah menempatkan desa wisata sebagai ujung tombak. Jumlah desa yang terdaftar di Jaringan Desa Wisata (Jadesta) melonjak dari 1.831 pada 2021 menjadi 3.419 pada 2022, dengan target 4.000 pada 2023 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023). Kabupaten Magetan di lereng barat Gunung Lawu termasuk daerah yang kaya potensi alam. Ikonnya, Telaga Sarangan bersama Telaga Wahyu, menyedot lebih dari satu juta pengunjung sepanjang 2023 dan membawa pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata Magetan ke angka Rp20,3 miliar, melampaui target 5,67% (Rasi FM, 2024).

Angka itu menyenangkan, tetapi menyembunyikan masalah. Kunjungan dan uang berputar hampir seluruhnya di Sarangan, sementara desa-desa wisata

di sekelilingnya jalan di tempat meski potensinya mirip. Ketika satu destinasi menanggung semua beban, keberlanjutannya rapuh terhadap naik-turun kunjungan. Ini juga pertanda bahwa potensi alam belum diubah menjadi penghasilan yang dinikmati banyak warga. Di Desa Sumberdodol, misalnya, pertumbuhan wisata tidak diikuti penataan lingkungan dan sarana yang memadai (Andini, Rahayu, Mukaromah, & Rahayu, 2024). Pertanyaan penelitian ini sederhana: bagaimana potensi alam, kewirausahaan warga, dan tata kelola kolaboratif bisa dipadukan agar wisata Magetan berkelanjutan dan tidak bergantung pada satu ikon?

Masalah serupa muncul di tingkat nasional. Setelah menelaah 54 artikel, Muda (2025) menemukan tiga hambatan yang terus berulang dalam pariwisata berkelanjutan Indonesia, yaitu partisipasi warga yang sekadar formalitas, manfaat yang timpang, dan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat yang jarang dilibatkan. Artinya, kelemahan destinasi jarang soal kurangnya potensi. Yang lebih sering bermasalah adalah cara mengelola dan membagi hasilnya, dan pola itulah yang tampak di Magetan.

Penelitian terdahulu cenderung membahas ketiga faktor secara terpisah. Alhadi, Zefnihan, Muchtar, dan Evanita (2023) menonjolkan potensi alam dalam model pariwisata berbasis komunitas, tetapi menaruh kewirausahaan sebagai pelengkap. Purnomo dan Purwandari (2025) fokus pada pemberdayaan UMKM, namun kurang menjelaskan bagaimana potensi alam menjadi bahan baku produk. Sumarna, Geohansa, Kania, Akbar, dan Ulumudin (2025) mengulas kolaborasi penta helix, tetapi belum mengaitkannya dengan pemanfaatan sumber daya alam dan penciptaan nilai usaha. Ada celah yang belum terisi, yakni model yang menyatukan ketiga dimensi sekaligus, khususnya untuk destinasi berbasis alam seperti Magetan.

Di sinilah kebaruan penelitian ini. Alih-alih membahas potensi alam, kewirausahaan, dan tata kelola satu per satu, penelitian ini memperlakukannya sebagai satu sistem yang saling mengunci. Potensi alam menjadi modal dan daya tarik. Kewirausahaan warga mengubah modal itu menjadi pendapatan yang tersebar. Tata kelola kolaboratif menjaga agar kepentingan selaras dan manfaat tidak menumpuk di segelintir orang. Menyatukan ketiganya dalam satu kerangka itulah yang membedakan kajian ini dari studi sebelumnya, sekaligus dari kajian Magetan yang biasanya hanya menyorot satu sisi.

Penelitian ini berdiri di atas tiga teori. Pertama, tata kelola kolaboratif (collaborative governance), yaitu pengaturan tempat aktor pemerintah dan non-pemerintah mengambil keputusan bersama secara konsensus (Ansell & Gash, 2008), yang berjalan sebagai rezim dinamis melalui keterlibatan yang

berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bertindak bersama (Emerson & Nabatchi, 2015; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Kedua, pariwisata berkelanjutan, yang menuntut ekonomi, lingkungan, dan sosial-budaya berjalan seimbang (Alhadi dkk., 2023). Ketiga, kewirausahaan berbasis komunitas, yang menjadikan UMKM, kepemimpinan lokal, dan inovasi sebagai mesin keberlanjutan (Purnomo & Purwandari, 2025).

Penelitian ini hendak melakukan empat hal: memetakan potensi alam Magetan sebagai modal pengembangan, melihat peluang kewirausahaan warga dalam memanfaatkannya, menelusuri pola kerja sama antar-pemangku kepentingan, dan menyusun model yang memadukan ketiganya untuk destinasi yang berkelanjutan. Urutannya sengaja bertahap, dari memetakan sampai merumuskan model yang bisa diterapkan.

Secara teori, penelitian ini menawarkan kerangka yang menautkan tata kelola, kewirausahaan, dan potensi alam, sesuatu yang selama ini jarang dibahas utuh. Secara praktis, hasilnya bisa menjadi pegangan Pemerintah Kabupaten Magetan, pengelola desa wisata, dan pelaku usaha untuk menyebar kunjungan agar tidak menumpuk di satu tempat, sekaligus menjaga agar manfaatnya adil dan lingkungannya lestari.

METODE

Penelitian ini kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pilihan ini masuk akal karena yang dicari bukan angka pengaruh antar-variabel, melainkan pemahaman utuh tentang bagaimana potensi alam, kewirausahaan, dan tata kelola saling bekerja di lapangan (Creswell & Creswell, 2023). Studi kasus dipakai karena persoalan Magetan tidak bisa dilepaskan dari konteksnya sendiri.

Lokasinya kawasan wisata alam di lereng Gunung Lawu, yaitu Telaga Sarangan dan Telaga Wahyu sebagai destinasi utama ditambah desa-desa wisata di sekitarnya. Kawasan ini sengaja dipilih karena memuat paradoks yang menjadi inti masalah, yakni potensi besar tetapi pengembangan yang menumpuk di satu ikon.

Data primer digali langsung dari lapangan lewat wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Data sekunder diambil dari laporan kinerja dinas, data BPS Magetan, dokumen perencanaan, dan publikasi ilmiah. Informan dipilih secara purposif, yaitu orang-orang yang benar-benar terlibat dan paham persoalan (Creswell & Creswell, 2023), mewakili lima unsur penta helix: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan media (Sumarna dkk., 2025). Bila perlu, pencarian informan dilanjutkan secara berantai sampai informasinya jenuh.

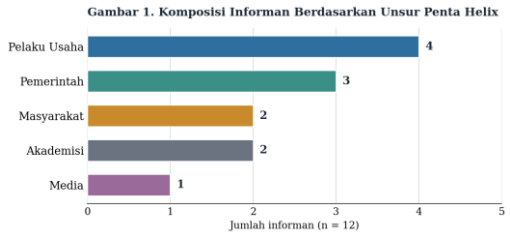
Ada empat cara pengumpulan data yang saling menambal. Observasi dipakai untuk melihat langsung kondisi alam, aktivitas usaha, dan cara

pengelolaan. Wawancara mendalam untuk menggali pandangan dan pengalaman tiap aktor. Diskusi kelompok untuk mempertemukan mereka dan membaca pola kerja samanya. Telaah dokumen untuk mengecek ulang temuan.

Analisisnya memakai model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020), yaitu menyaring data, menyajikannya dalam narasi dan matriks, lalu menarik dan menguji simpulan. Ketiganya berjalan bolak-balik, bukan berurutan kaku. Agar temuan tepercaya, keabsahannya dijaga dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu, ditambah pengecekan ulang ke informan serta kecukupan rujukan (Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian melibatkan dua belas informan dari lima unsur penta helix (Gambar 1). Pelaku usaha paling banyak, empat orang, disusul pemerintah tiga, masyarakat dan akademisi masing-masing dua, dan media satu. Data dikumpulkan dari dua belas wawancara, empat observasi di Telaga Sarangan, Telaga Wahyu, Desa Sumberdodol, dan satu desa penyangga Lawu, satu diskusi kelompok, serta delapan dokumen. Dari sini muncul enam temuan yang saling terkait, dan keabsahannya diperiksa lewat triangulasi (Gambar 2).



Sumber: data primer penelitian, 2026

Temuan pertama soal potensi alam. Hampir semua informan menyebut telaga, lanskap Lawu, udara sejuk, lahan pertanian, hutan, dan budaya sebagai modal. Sayangnya, kata "potensi" lebih sering berarti sesuatu yang baru mungkin dikembangkan, bukan produk yang siap dijual. Sarangan jadi magnet, sedangkan Telaga Wahyu dan desa penyangga sepi pengunjung, promosi, dan investasi. Observasi menegaskannya: Sarangan padat pada jam ramai, Telaga Wahyu lengang dengan belanja pengunjung yang tipis. Seorang akademisi menunjuk akar soalnya, "yang belum kuat itu alasan wisatawan untuk berpindah dari Sarangan ke tempat lain, karena rutenya, ceritanya, dan produknya belum disatukan" (ACA-01).

Soal penyebabnya, pandangan terbelah. Pemerintah menganggapnya wajar karena fasilitas dan citra Sarangan sudah matang. Media dan komunitas menilai konsentrasi itu ikut diciptakan oleh promosi dan anggaran yang berputar di tempat yang sama. Literatur terbaru tentang overtourism menegaskan bahwa penumpukan pengunjung di satu titik memicu tekanan lingkungan dan sosial sekaligus

menyisakan wilayah pinggiran yang terbengkalai, dan kuncinya adalah menyebar pengunjung dengan menghidupkan kawasan sekunder serta menyambungkan rute (Gatto & Scorza, 2025). Jadi ketimpangan Magetan bukan hanya soal kesiapan destinasi, tetapi juga soal ke mana kebijakan dan promosi diarahkan.

Temuan kedua soal usaha warga. Kuliner, suvenir, homestay, dan jasa wisata sudah memanfaatkan kunjungan. Tetapi produknya banyak yang seragam, gampang ditiru, dan kurang berakar pada kekhasan lokal. Pelatihan sering diadakan, namun pendampingan lanjutan, kurasi, standar mutu, akses pasar, dan jejaring antar-usaha jarang berkelanjutan. Jarak antara bisa membuat dan laku terjual terasa nyata: "Pelatihan kemasan pernah, foto produk pernah. Masalah kami setelah itu siapa yang menghubungkan ke toko, hotel, atau paket wisata" (BUS-02).

Homestay (BUS-03) menunjukkan jalan keluar. Dengan menjalin hubungan langsung ke komunitas perjalanan dan menawarkan pengalaman, bukan sekadar kamar, tamu tinggal lebih lama dan pendapatan naik. Pasar ternyata bisa tumbuh saat produk, pengalaman, dan promosi dijahit jadi satu. Temuan ini sejalan dengan studi desa wisata di Sleman: banyak desa gagal membuat suvenir khas dan layanan purnajual, lalu bergantung pada pihak lain untuk promosi dan informasi (Sutomo, Sianipar, Hoshino, & Onitsuka, 2024). Karena itu pemberdayaan UMKM harus diurus sebagai rantai nilai, dari inkubasi sampai transaksi, bukan berhenti di ruang pelatihan (Purnomo & Purwandari, 2025), dan potensi alam baru bernilai ketika menjadi produk yang tersambung ke pasar (Alhadi dkk., 2023).

Temuan ketiga soal kolaborasi. Rapat, sosialisasi, kelompok kerja, dan obrolan informal semuanya ada. Tetapi tiap pihak memaknai kolaborasi secara berbeda. Bagi pemerintah, undangan rapat dan program lintas instansi sudah dianggap kolaborasi. Bagi Pokdarwis dan UMKM, kolaborasi baru berarti kalau mereka dilibatkan sejak merumuskan masalah sampai mengevaluasi. "Kami sering diundang, tetapi kadang undangannya untuk mendengar program yang sudah jadi. Beda dengan diajak sejak awal membahas masalah dan memilih mana yang didahulukan," kata koordinator Pokdarwis (COM-01). Akademisi menyebutnya perbedaan antara kolaborasi proyek yang selesai bersama anggaran, dan tata kelola kolaboratif yang butuh forum tetap, aturan main, data, kepercayaan, serta kapasitas bertindak bersama (ACA-01).

Secara teori, syarat collaborative governance memang belum lengkap: keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas bertindak bersama belum melembaga (Ansell & Gash, 2008; Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012). Masalahnya bukan kurang aktor, melainkan tidak adanya

meja bersama yang punya agenda rutin, data, penanggung jawab, dan tindak lanjut, sehingga banyak program bergantung pada figur tertentu. Paradoks serupa terekam di Waiheke Island: aktor lokal yang paling bersemangat justru paling sedikit kewenangannya, sementara keputusan dipegang otoritas yang lebih jauh (Sarhan, Pernecky, Orams, & Lück, 2025). Forum penta helix yang bermandat menjadi syarat agar kolaborasi naik kelas dari sekadar prosedur (Sumarna dkk., 2025).

Temuan keempat soal pembagian manfaat. Yang paling cepat menikmati hasil adalah pelaku dengan lokasi bagus, aset, jaringan, atau modal. Pelaku di desa penyangga menanggung ongkos promosi dan akses pasar yang lebih berat. Perempuan banyak bekerja di dapur dan administrasi usaha, tetapi jarang ikut memutuskan. Pemuda kuat di konten digital dan kegiatan lapangan, namun perannya rapuh karena mengandalkan kerja sukarela. Tidak ada mekanisme berbagi manfaat antar-destinasi yang tertata; hubungan Sarangan dengan desa sekitar masih sebatas limpahan kebetulan, bukan rute atau sistem rujukan yang dirancang.

Pola ini mengingatkan pada studi beberapa desa wisata Indonesia: berbagi hasil yang inklusif menambah daya tahan, tetapi bahkan di model yang inklusif pun suara perempuan dalam keputusan besar masih kalah dari tokoh senior laki-laki (Pramono & Juliana, 2025). Ketimpangan dan partisipasi setengah hati ini sejalan dengan hambatan nasional yang dicatat Muda (2025).

Temuan kelima soal lingkungan. Sebagian aktor menganggap kebersihan dan penghijauan sebagai kegiatan rutin. Tetapi daya dukung, batas kunjungan, pengaturan ruang, standar sampah, dan pemantauan dampak belum menjadi bahasa bersama. Lingkungan biasanya diurus setelah ramai dan bermasalah. Pengelola kawasan mengakui belum ada ambang batas kunjungan yang benar-benar diterapkan, “yang ada lebih pada rekayasa operasional saat ramai” (GOV-02). Akademisi mengingatkan, mengukur sukses hanya dari jumlah pengunjung dan pendapatan berbahaya bagi lingkungan (ACA-02).

Daya dukung semestinya menjadi batas perencanaan, bukan program bersih-bersih susulan, seperti ditekankan pendekatan pengelolaan overtourism yang menautkan pengendalian kepadatan dengan penyebaran ruang dan waktu (Gatto & Scorza, 2025). Pengalaman penataan di Sumberdodol pun menunjukkan bahwa penghijauan dan sarana penunjang perlu dirawat terus, bukan berhenti sebagai seremoni (Andini dkk., 2024).

Enam temuan itu bisa dirangkum. Matriks triangulasi (Gambar 2) memperlihatkan konsentrasi kunjungan, lemahnya nilai tambah usaha, dan tekanan lingkungan musiman berstatus kuat karena terkonfirmasi dari wawancara, observasi, sekaligus dokumen.

Journal Education and Government Wiyata ISSN 2986-5131
Volume 4 Nomor 3, Agustus 2026 (554-564)
https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov

Kolaborasi prosedural berstatus sedang sampai kuat, dan keterbatasan inklusi berstatus sedang. Benang merahnya satu: Magetan tidak kekurangan potensi, melainkan kekurangan orkestrasi yang menautkan potensi alam, kewirausahaan, dan tata kelola.

Gambar 2. Matriks Triangulasi Temuan Antar-Sumber Data

	Wawancara	Observasi	Dokumen	Status
Konsentrasi kunjungan di Sarangan	Kuat	Kuat	Kuat	*Kuat*
Usaha belum bernilai tambah tinggi	Kuat	Kuat	Sedang	*Kuat*
Kolaborasi masih prosedural	Kuat	Sedang	Sedang	*Sedang-Kuat*
Tekanan lingkungan musiman	Kuat	Kuat	Sedang	*Kuat*
Inklusi pemuda/perempuan terbatas	Sedang	Sedang	Sedang	*Sedang*

Sumber: hasil analisis data, 2026

Untuk menjawab tujuan keempat, disusun Model Integrasi PAKTA (Gambar 3) dengan lima komponen: Pemetaan potensi dan daya dukung, Akselerasi kewirausahaan lokal, Kolaborasi pentahelix berbasis mandat, Tata distribusi manfaat, serta Adaptasi dan akuntabilitas keberlanjutan. Potensi alam menjadi basis (P), kewirausahaan mengubahnya menjadi nilai (A), tata kelola kolaboratif mengikat semuanya (K), pemerataan dijaga lewat T, dan keberlanjutan dikawal lewat A yang terakhir. Kelimanya digerakkan bersama oleh aktor penta helix, diarahkan pada tiga pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan umpan balik pemantauan yang terus berjalan.

Gambar 3. Model Integrasi PAKTA untuk Destinasi Pariwisata Berkelanjutan



Sumber: hasil sintesis penelitian, 2026

Model ini menautkan ketiga teori yang dipakai. Komponen K menjalankan tata kelola kolaboratif sebagai rezim yang hidup dan mampu bertindak bersama (Emerson & Nabatchi, 2015). Komponen A pertama menerjemahkan pemberdayaan UMKM sebagai rantai nilai (Purnomo & Purwandari, 2025). Komponen T dan A terakhir menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menjadi inti pariwisata berkelanjutan (Alhadi dkk., 2023). Dibanding kajian penta helix yang berhenti pada koordinasi aktor (Sumarna dkk., 2025), model ini menambahkan pemanfaatan potensi alam dan penciptaan nilai usaha ke dalam satu alur yang terukur. Perlu dicatat, model ini lahir dari satu studi kasus, jadi masih harus diuji di destinasi lain sebelum digeneralisasi.

KESIMPULAN

Keberlanjutan wisata Magetan ternyata tidak ditentukan oleh banyaknya potensi alam, melainkan oleh kemampuan menautkan potensi alam, kewirausahaan warga, dan tata kelola kolaboratif dalam satu gerak, sebab kenyataannya potensi yang

beragam masih menumpuk di Telaga Sarangan, usaha warga hidup tetapi lemah pada nilai tambah dan akses pasar, kolaborasi baru sebatas rapat, manfaat belum merata, dan lingkungan belum dijadikan batas, sehingga ketiganya perlu disatukan lewat Model PAKTA (Pemetaan potensi dan daya dukung, Akselerasi kewirausahaan, Kolaborasi pentahelix bermandat, Tata distribusi manfaat, serta Adaptasi dan akuntabilitas); karena itu Pemerintah Kabupaten Magetan bersama pelaku usaha, warga, akademisi, dan media sebaiknya membentuk forum pengelolaan klaster destinasi yang punya agenda, data, dan indikator bersama, menyusun peta potensi dan daya dukung sebagai dasar perencanaan, membangun inkubasi usaha yang tersambung sampai pasar, merancang rute dan rujukan antar-destinasi agar kunjungan menyebar dari ikon utama ke desa penyangga, serta memakai indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk evaluasi berkala, sementara penelitian lanjutan sebaiknya menguji Model PAKTA di klaster destinasi lain dan menambah pendekatan kuantitatif supaya temuannya lebih bisa digeneralisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Alhadi, Z., Zefnihan, Muchtar, B., & Evanita, S. (2023). Developing a community-based tourism model for sustainable tourism in the Mandeh area, West Sumatra Province, Indonesia. International Journal of Sustainable Development and Planning, 18(11), 3491–3503. https://doi.org/10.18280/ijsdp.181114

Andini, I., Rahayu, P., Mukaromah, H., & Rahayu, M. J. (2024). Pengembangan wisata berkelanjutan melalui penghijauan sarana penunjang wisata di Desa Sumberdodol Kabupaten Magetan. Jurnal Pengabdian Sosial, 2(1), 2335–2343. https://doi.org/10.59837/s519gg80

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (6th ed.). SAGE Publishing.

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Collaborative governance regimes. Georgetown University Press.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1–29.

https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Gatto, R. V., & Scorza, F. (2025). "Anti-gravity tourism planning": An analytical approach to manage tourism congestion, seasonality and overtourism. Urban Science, 9(12), 524. https://doi.org/10.3390/urbansci9120524

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Kian melesat di 2023, pariwisata Indonesia bersiap menuju level prapandemi. Media Keuangan. https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kian-melesat-di-2023-pariwisata-indonesia-bersiap-menuju-level-prapandemi

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2023). ADWI 2023: 4000 desa wisata. Jaringan Desa Wisata (Jadesta). https://jadesta.kemenpar.go.id/berita/94791

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Muda, F. (2025). Community participation in Indonesian sustainable tourism: A systematic review of models, impacts, and gaps. Priviet Social Sciences Journal, 5(8), 125–139. https://doi.org/10.55942/pssj.v5i8.462

Pramono, R., & Juliana, J. (2025). Beyond tourism: Community empowerment and resilience in rural Indonesia. Tourism and Hospitality, 6(4), 210. https://doi.org/10.3390/tourhosp6040210

Purnomo, S., & Purwandari, S. (2025). A comprehensive micro, small, and medium enterprise empowerment model for developing sustainable tourism villages in rural communities: A perspective. Sustainability, 17(4), 1368. https://doi.org/10.3390/su17041368

Rasi FM. (2024). Pengunjung Telaga Sarangan capai sejuta pengunjung, pendapatan sektor wisata di Magetan tahun 2023 lebihi target capaian. https://rasifm.co.id/pengunjung-telaga-sarangan-capai-sejuta-pengunjung-pendapatan-sektor-wisata-di-magetan-tahun-2023-lebihi-target-capaian/

Sarhan, M., Pernecky, T., Orams, M., & Lück, M. (2025). Exploring collaborative governance and community participation in tourism and conservation—Insights from Waiheke Island, New Zealand. Frontiers in Sustainable Tourism, 4, 1567048.

https://doi.org/10.3389/frsut.2025.1567048

Sumarna, E., Geohansa, A., Kania, I., Akbar, G. G., & Ulumudin, A. (2025). The penta helix model in tourism village development: A case study of Samida, Garut Regency. Ilomata International Journal of Social Science, 6(2), 748–761. https://doi.org/10.61194/ijss.v6i2.1683

Sutomo, Y. A. W., Sianipar, C. P. M., Hoshino, S., & Onitsuka, K. (2024). Self-reliance in community-based rural tourism: Observing tourism villages (desa wisata) in Sleman Regency, Indonesia. Tourism and Hospitality, 5(2), 448–471. https://doi.org/10.3390/tourhosp5020028